

BAB III

INTERVENSI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KONFLIK NAGORNO KARABAKH

Pasca runtuhnya Uni Soviet, kebijakan Amerika Serikat terhadap negara-negara bekas Soviet tertuju kepada Rusia khususnya terhadap stok senjata nuklir yang masih cukup signifikan jumlahnya. Sehingga berkenaan dengan ini Amerika Serikat tertarik kepada negara-negara pewaris Soviet khususnya negara-negara yang memiliki senjata nuklir seperti Ukraina dan Kazakhstan. Amerika mengawal pengiriman sisa senjata nuklir dari negara-negara tersebut untuk dikirimkan ke Rusia dengan menyertakan undang-undang pelarangan memperbanyak senjata nuklir atau biasa dikenal dengan *policy of horizontal non-proliferation*. Pada masa ini, Amerika Serikat tidak mempunyai formula yang jelas terkait kebijakannya terhadap Kaukasus dan Asia Tengah kecuali dukungannya terhadap kemerdekaan terhadap masing-masing negara yang merdeka tersebut. Karena pada saat ini Amerika Serikat belum menyadari potensi yang dimiliki oleh Kaukasus dan Asia Tengah secara Geopolitik. Sebaliknya yang mereka fahami saat itu hanyalah terbatas pada negara yang mempunyai penduduk yang miskin, tidak dinamis, dan sangat kekurangan orang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga dari pemahaman ini, kongres Amerika Serikat tidak tertarik untuk memberikan kebijakan khusus terhadap dua daerah besar yang nantinya justru memainkan peran yang sangat penting dalam kancah internasional ini. Terlebih ketika mereka

luput dari perhatian Amerika Serikat pada saat itu. Satu-satunya yang menjadi perhatian Amerika Serikat pada saat itu adalah reformasi ekonomi di Rusia. Sementara pada negara-negara yang baru merdeka, Amerika hanya berbasa-basi melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya terhadap Rusia. Bisa dikatakan Amerika bersikap tidak proaktif dalam periode ini terhadap negara-negara baru bekas Soviet bagian selatan atau biasa disebut dengan NIS (*Newly Independent States*). Dalam periode ini, Amerika hanya mempunyai petunjuk dasar terkait kepentingannya di NIS termasuk pengakuan negara-negara merdeka, mendukung transisi menuju ekonomi pasar dan masyarakat demokratis, memfasilitasi integrasi institusi internasional, dan pengaturan regional yang kooperatif. Namun begitu, selain kepentingan untuk proses transisi ekonomi pasar dan demokrasi di Rusia, juga untuk membatasi penyebaran senjata nuklir dengan meyakinkan Belarus, Kazakhstan dan Ukraina untuk menyerahkan senjata nuklirnya kepada Rusia. Perhatian penuh Amerika Serikat terhadap empat negara pemilik senjata nuklir tersebut, membuatnya melupakan perhatian yang serius pada Kaukasus dan Asia Tengah sampai pada tahun 1994. Walaupun demikian, kemudian AS menyatakan tiga kebijakan khusus untuk NIS:

Pertama, Amerika mendukung penuh kemerdekaan NIS dan berjanji untuk mencegah NIS dari orbit Rusia atau Iran.

Kedua, AS berjanji akan mendukung mendirikan rejim yang demokratis dan liberal pada NIS, dan kebijakan AS akan menyesuaikan secara parsial sesuai dengan kemajuan proses demokratisasi.

Ketiga, AS mendukung ekspor sumber energi Kaspia dengan tidak bergantung pada rute Rusia dan Iran.

2. Periode kedua: Formulasi Sebuah Kebijakan (1994-1996)

Sementara departemen luar negeri AS sibuk berurusan dengan Yeltsin dengan transisi ekonominya juga badan internasional yang sama-sama mendukung transisi ekonomi Rusia, justru sektor swasta telah menemukan sumber minyak kaspia. Pentingnya minyak kaspia dan Kaukasus ditemukan di Houston, bukan di Washington. Perusahaan minyak ini telah memantau dari awal dan memastikan tidak ketinggalan dari perjanjian kerjasama di Kazakhstan dan Azerbaijan. Perusahaan Amerika mengambil peran penting di sini. Di Kazakhstan, *Chevron* merupakan aktor primer dalam pengembangan lahan minyak di Tengiz, dengan kontrak yang disepakati pada tahun 1993. Sementara di Azerbaijan, mereka telah melakukan kesepakatan pada tahun 1994 untuk 1 abad dengan jumlah saham sebesar 40%. Perusahaan swasta ini lambat laun menarik kepentingan pemerintah pada wilayah potensial ini.

Kepentingan Amerika Serikat terhadap sumber energi minyak di laut kaspia disambut baik oleh presiden Azerbaijan, Heydar Aliyev. Aliyev sengaja membiarkan sebanyak mungkin negara-negara barat masuk guna mempertahankan sekaligus mendukung rejimnya di Azerbaijan. Energi minyak Azerbaijan berada di lepas pantai, sementara Kazakhstan lebih banyak berada di darat. Hal ini menjadikannya lebih rawan konflik atas batas kepemilikan laut kaspia dengan Turkmenistan. Tentu Rusia dan Iran akan turut campur akan status

kepemilikan ini, karena kepentingannya untuk mencegah partisipasi Amerika Serikat. Namun demikian, ini semua merupakan bagian dari desain kebijakan luar negerinya Heydar Aliyev. Situasi ini dimanfaatkan betul oleh Aliyev demi menjaga kejayaan rejimnya sekaligus upaya mendapatkan dukungan integritas wilayahnya dengan Nagorno Karabakh.

Aliyev meembuat prioritas negara mana yang akan menjalin kerjasama minyak laut Kaspia. Amerika Serikat menempati prioritas pertama bagi Aliyev karena kedekatannya dengan Amerika Serikat akan menjadi penyeimbang Lobi Armenia di Amerika Serikat yang teramat kuat setelah Lobi Israel.

Disisi lain, perusahaan swasta yang telah menjalin kerjasama dengan Azerbaijan pun harus mempengaruhi pemerintah untuk turut campur dalam setiap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan karena beberapa alasan: pertama, Kaukasus khususnya Azerbaijan adalah daerah yang tidak stabil, sehingga sewaktu-waktu dapat saja mengganggu proses berjalannya proyek ini. Kedua, perjanjian ini telah dilakukan bersama Aliyev yang kebetulan diterima dengan sangat baik; dari itu mereka khawatir, ketika pemimpin mereka berganti, maka perjanjian dengannya bisa saja terganggu. Perusahaan minyak AS juga harus bisa mengajak pemerintah AS untuk bisa menjamin kekuasaan rejim Aliyev dengan menghilangkan ancaman-ancaman external seperti dari pengaruh Rusia dan konflik Nagorno Karabakh. Langkah yang dilakukan oleh perusahaan minyak AS ini dengan cara menyalurkan sahamnya di Azerbaijan dengan sebanyak-banyaknya agar nanti dapat dilihat oleh pemerintah AS dan akhirnya ikut

mendukung proyek tersebut. Selain itu, perusahaan minyak AS juga mendorong pemerintah untuk segera mencabut sanksi larangan bantuan US AID untuk Azerbaijan atau yang terkenal dengan nama *section 907*. Karena jika ini terjadi, maka perusahaan minyak AS dapat memanfaatkan pinjaman besar dari pemerintah AS. Apalagi, perusahaan minyak lain di Eropa dan Timur Tengah akan mengapresiasi jika *Section 907* benar-benar dihapus.

Atas dorongan perusahaan minyak AS, pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap isu ini. Beberapa alasan yang mendukung AS jika mengabulkan permintaan perusahaan minyak AS tersebut, diantaranya: pertama, minyak kaspia akan mengurangi ketergantungan AS atas energi di Teluk Persia yang selama ini tidak lagi stabil, dengan begitu ekspor minyak kaspia harus ke Barat. Kedua mencegah partisipasi Iran dengan tidak melewati pipa minyak ke Iran, sehingga Iran dapat dicegah untuk ikut mempengaruhi negara-negara Kaukasus.

3. Periode ketiga: Menjalin hubungan strategis (1997 dan sesudahnya)

Perubahan yang paling penting pada masa pemerintahan Clinton adalah diangkatnya Madeleine Albright yang dikenal tegas sebagai menteri luar negeri AS menggantikan Warren Christopher. Selang berapa lama perhatian terhadap wilayah Kaspia mulai meningkat. Pada tanggal 27 Maret 1997, dua bulan setelah pemerintahan Clinton yang kedua, Sandy Berger, penasihat keamanan nasional menekankan dan menegaskan keterlibatan Washington terhadap China, Turki, dan

area Kaukasus. Pada bulan Juli di tahun yang sama, wakil menteri luar negeri, Strobe Talbott mengatakan bahwa Transkaukasia dan Kaukasus merupakan wilayah yang sangat vital bagi AS. Dari sini kebanyakan peneliti menyimpulkan bahwa kepentingan Amerika menjadi tumpah ruah di wilayah Kaukasus dan Asia Tengah. Perubahan kebijakan ini menurut kebanyakan peneliti adalah karena kepentingan minyak Amerika. Mengingat Amerika sebagai negara maju membutuhkan sumber energi yang sangat banyak.

B. Minyak Kaspia Bagi AS

Laut Kaspia adalah laut yang seperti danau asin yang berada di pedalaman. Laut ini terletak di diantara pegunungan Kaukasus dan padang rumput Asia Tengah, laut ini memiliki luas 372.000 km² (lebih luas dari Itali, Polandia, dan United Kingdom), dengan panjang 1200 km² dan lebar 320 km². Laut Kaspia berbatasan dengan lima negara: Rusia (sebelah barat laut, berpenduduk 142 juta), Kazakhstan (sebelah timur laut, berpenduduk 15 juta jiwa), sebelah tenggara berbatasan dengan Turkmenistan dengan jumlah penduduk 5 juta jiwa, sebelah selatan berbatasan dengan Iran dengan jumlah penduduk sebesar 71 juta jiwa, sebelah barat daya berbatasan dengan Azerbaijan dengan jumlah penduduk 8,5 juta jiwa. Negara-negara yang berbatasan dengan laut kaspia kecuali Iran tergabung dalam *Commonwealth of Independent States* (CIS) yang dibuat pasca runtuhnya Uni Soviet³⁹.

³⁹ Benkirane, Reda. *Geoeconomy and Geopolitics of Oil Note on the strategic dimension of the*

Secara geopolitik, wilayah Kaspia tiba-tiba mencuat dan menjadi perhatian dunia internasional pasca berakhirnya perang dingin. Perhatian ini datang baik dari aktor negara maupun non-negara demi mendapatkan sumber energi yang teramat besar nilainya. Laut Kaspia berada sejajar dengan daerah yang memiliki potensi minyak terbesar dari Kaukasus sampai ke timur tengah. Terlebih dengan daerah tambahan lainnya yang berpotensi di sekitar Asia Tengah seperti Uzbekistan, Tajkistan dan Kyrgistan.

Dalam kerangka potensi kekayaan negara-negara baru merdeka ini menjelma menjadi Emirata abad 21. Namun demikian, dari mulai zaman komunis sampai zaman perang melawan terorisme, Populasi di Asia Tengah yang mayoritasnya berpenduduk muslim tunduk pada kekuasaan yang pro-barat. Hal ini ternyata membuat mereka jauh dari keuntungan atau kesejahteraan secara ekonomi. Keberadaan *Commonwealth of Independent States* justru menjadi satu entitas politik dimana Federasi Rusia dapat menyebarkan pengaruhnya pada negara-negara bekas Soviet di laut kaspia. Sementara disisi lain, Amerika Serikat tentu tidak mau ketinggalan dengan serta merta melawan dominasi Rusia terhadap Laut Kaspia. Bagi Amerika, keberadaannya dalam percaturan Laut Kaspia dimasukan kedalam kepentingan nasionalnya yang strategis.

C. Rusia di Kaukasus Selatan

Konsekuensi dari bubarnya Uni Soviet menjadikan tiga negara Kaukasus merdeka secara sekaligus, yaitu Azerbaijan, Armenia, dan Georgia. Seperti pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1918 dibawah kepemimpinan Bolshevik, dimana Kaukasus melepaskan diri dari Rusia karena konflik internal yang terjadi

di Rusia. Maka pada pemerintahan Czarist pada tahun 1991, Rusia mencoba membangun demokratisasi liberalnya karena kembali kehilangan beberapa wilayahnya. Sebenarnya baik pada tahun 1918 maupun tahun 1991, Moskow mengakui kemerdekaan ketiga negara kaukasus selatan itu. Pada mulanya tidak ada ketertarikan untuk memilikinya kembali, tidak dalam jangka pendek. Akan tetapi dua tahun kemudian, pada dua kondisi tersebut, Rusia kembali mencoba mengambil alih kekuasaan di tiga negara tersebut. Pada tahun 1918, Rusia memaksa tiga negara tersebut tunduk dan mempersatukan mereka kedalam Uni Soviet. Pada tahun 1990, Rusia kehilangan taktiknya sampai kemudian runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Pada tahun 1990-an terdapat banyak perbedaan tentang pembuatan kebijakan Rusia terhadap Kaukasus Selatan dari setiap negara anggota Rusia. Perbedaan formula kebijakan ini kemudian menerapkan kebijakan yang berbeda-beda. Kebijakan resmi pemerintah Moskow pun berubah-ubah di tahun 1990-an. Setelah beberapa tahun dari keruntuhan Soviet, kebijakan luar negeri Rusia menjadi bermacam-macam. Kondisi pertama ketika runtuhnya Uni Soviet, negara-negara anggotanya seperti Kaukasus Selatan ini menjadi kehilangan arah.

Sementara Rusia harus banyak menentukan kebijakan dalam negerinya terlebih dahulu sebelum kemudian menentukan kebijakan luar negerinya khususnya Kaukasus. Secara *defacto*, Rusia pada saat itu melepaskan kontrolnya terhadap Kaukasus Selatan baik secara politik maupun militer. Walaupun demikian, tidak ada konsensus yang memperjelas hubungan Rusia dan Kaukasus Selatan.

Meskipun pemerintah resmi Moskow cenderung masih memberi perhatian terhadap Kaukasus Selatan daripada membuat jalan ke Barat untuk Rusia, akan tetapi kebijakan ini banyak ditentang oleh banyak negara-negara bagian. Dari sini pintu Kaukasus seakan-akan terbuka bagi siapapun.

D. Kebijakan Luar Negeri AS

Kebijakan luar negeri AS adalah kebijakan yang mengatur interaksinya dengan bangsa lain juga mengatur standar interaksi pihaknya meliputi organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan, dan setiap individunya dalam berinteraksi dengan bangsa lain. Amerika Serikat sangat berpengaruh di dunia Internasional. Kekuatan Amerika Serikat di dukung dengan sektor ekonominya yang mencapai 14 trilyun dollar AS yang merupakan seperempat dari jumlah GDP (*Gross Domestic Product*). Sementara budget yang disiapkan untuk pertahanan nasional sekitar 711 milyar dollar AS, merupakan 43 % dari pengeluaran anggaran militer global. Sekretaris negara merupakan menteri luar negeri dan secara resmi yang bertindak melakukan diplomasi antar negara, walaupun presiden sendiri mempunyai otoritas terhadap kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri

tersebut meliputi kepentingan nasionalnya sekaligus strategi yang mengantarkannya kepada pencapaian goalnya AS.

Amerika Serikat memiliki goal yang tercantum secara resmi dalam agenda departemen luar negeri AS yaitu, menciptakan dunia yang aman, demokratis, dan sejahtera yang membawa keuntungan bagi masyarakat AS dan internasional.

Selain itu komite perwakilan kebijakan luar negeri AS juga menegaskan bahwa AS mempunyai *Goal* yurudiksi berupa mengontrol ekspor, termasuk mencegah pengembangbiakan teknologi nuklir dan perangkat kerasnya, mengukur perkembangan hubungannya dengan negara lain dan mengawal segala bisnis AS di luar negeri dan menjamin keamanan warga Amerika di luar negeri dan ekspatriat. Kebijakan luar negeri selalu menuai pro dan kontra dan kritik yang banyak baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Presiden AS juga mempunyai hak untuk melakukan negosiasi dengan bangsa lain, akan tetapi perjanjian yang dihasilkan harus diratifikasi oleh 2/3 senate. Presiden juga merupakan panglima perang dari militer AS yang mempunyai otoritas memerintah tentara militer AS. Akan tetapi hanya kongres yang dapat mendeklarasikan perang, dan anggaran sipil dan militer ditulis oleh kongres. Sekretasi negara merupakan menteri luar negeri yang mempunyai wewenang primer berdiplomasi. Baik sekretaris maupun duta besar, keduanya ditunjuk oleh presiden, tentunya dengan pertimbangan dan persetujuan senat.

Kongres juga mempunyai kekuatan untuk mengatur perdagangan dengan bangsa lain.

E. OSCE (*Organization for Security and Co-operation in Europe*)

OSCE merupakan organisasi keamanan dan kerjasama terbesar di dunia dengan partisipasi 56 negara-negara dari Eropa, Asia Tengah, dan Amerika Utara.

OSCE merupakan media sebagai sebuah peringatan dini, pencegahan konflik, manajemen krisis dan rehabilitasi pasca konflik di dalam negara anggotanya. Terdapat 18 operasi di Eropa Timur-Selatan, Eropa Tenggara, Kaukasus Selatan, dan Asia Tengah⁴⁰.

Organisasi keamanan ini membawahi 3 dimensi keamanan, yaitu Politik Militer, Ekonomi dan Lingkungan, dan dimensi kemanusiaan. Oleh karena itu OSCE ini ditujukan pada jangkauan keamanan yang luas termasuk kontrol senjata api, ukuran pembangunan keamanan dan kepercayaan, HAM, nasional minoritas, demokratisasi, strategi kebijakan luar negeri, *counter-terrorist* dan aktivitas lingkungan dan ekonomi. Semua 56 negara berpartisipasi dengan status yang sama, sehingga keputusan harus diambil bersama dengan konsensus, tetapi tidak mengikat secara dasar hukum.

⁴⁰ <http://www.osce.org/about/13131.html> diakses pada tanggal 14 Juni 2010 pukul 05.10 WIB

Di dalam tubuh OSCE terdapat 450 orang yang bekerja di berbagai institusi dan sekitar 3000 lapangan operasi / misi. Staff lokal jauh lebih banyak dibanding staff internasional dengan perbandingan sekitar 1:5. Anggota staff yang diperbantukan oleh pemerintah nasionalnya masing-masing.

1. Sejarah OSCE

Awal mula dibentuknya OSCE berawal dari konferensi keamanan dan kerjasama Eropa atau dikenal dengan CSCE (*Conference on Security and Co-operation in Europe*) yang berfungsi sebagai forum dialog multilateral dan negosiasi antara Timur dan Barat. Pertemuan yang dilaksanakan di Helsinki dan Genewa ini dalam kurun waktu 2 tahun ini menghasilkan *Helsinki Final Act*, yang ditandatangani pada tanggal 1 August 1975. Perjanjian ini berisi tentang komitmen negara anggota terhadap sektor politik militer, ekonomi dan lingkungan, dan HAM. Perjanjian ini lebih dikenal dengan istilah 'Helsinki process'. Dalam pertemuan ini juga menghasilkan 10 prinsip fundamental (the 'Decalogue') mengatur perilaku pemerintah terhadap warga negaranya juga mengatur sesama warganya.

Sampai pada tahun 1990, CSCE berfungsi sebagai serangkaian pertemuan dan konferensi yang dibangun pada negara yang berpartisipasi di dalamnya selama terus mengevaluasi implementasinya. Namun dengan berakhirnya perang dingin, pada bulan November 1990, CSCE memainkan peranan baru. Paris

Summit membuat agenda baru untuk CSCE, yaitu mengatur perubahan yang terjadi di daerah Eropa pasca perang dingin yang tentunya akan mengarah ke paa kapabilitas operasional dan institusi permanen. Sehingga kemudian dari yang tadinya terbatas pada pertemuan dan konferensi berubah menjadi organisasi. Dan namanya pun berubah dari CSCE menjadi OSCE atas keputusan yang diambil oleh semua kepala negara anggota pada Budapest Summit bulan December 1994.

2. Negara-negara Anggota OSCE

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republic Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Federasi Russia, San Marino, Serbia, Republik Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States of America , dan Uzbekistan.

Melalui organisasi inilah AS turut serta dalam konflik Nagorno Karabakh. Dari OSCE, terbentuk satu cabang grup operasi bernama *Minsk Group* yang dikhususkan untuk mencari solusi damai konflik Nagorno Karabakh. AS bertindak sebagai salah satu ketua pada *Minsk Group* ini.

3. Minsk Group

Pada tanggal 24 Maret 1992 menghasilkan satu keputusan untuk membentuk satu tim khusus memfasilitasi proses perdamaian di Nagorno Karabakh dengan dasar-dasar prinsip, komitmen, dan berdasar pada CSCE. Konferensi diadakan di daerah Minsk, Belarus maka kemudian tim ini disebut Minsk Group.

Selain itu, pada *Budapest Summit* tanggal Desember 1994, konferensi menganggap perlu untuk mengangkat ketua tim Minsk Group ini. Konferensi juga menyetujui pembicaraan tentang bagaimana kepala negara diminta untuk bersedia mengirimkan sebagian tentaranya untuk bergabung dalam tentara perdamaian untuk konflik ini. Implementasi dari pertemuan itu akhirnya diberikan mandat dari ketua CSCE kepada ketua terpilih Minsk Group pada tanggal 23 Maret 1995. Tim Minsk Group ini selain disebut Minsk Group juga sering disebut Minsk Proses⁴¹.

a. Tugas Minsk Proses/Grup

Tugas *Minsk Grup* meliputi:

Menyediakan dan mendukung kerangka yang cocok untuk resolusi konflik dengan terus menyakinkan proses negosiasi.

⁴¹ <http://www.osce.org/item/21979.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2010 pukul 03.42 WIB

Mendapatkan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih guna diambil jalan tengah antara keduanya, dan memberi jalan kepada pasukan perdamaian untuk bisa melakukan tugasnya disana di bawah payung CSCE.

b. Mekanisme

Pemimpin Minsk Group akan datang ke kedua daerah yang berselisih dan melakukan perundingan untuk mendapatkan maksud dan keinginan masing-masing pihak. Selain itu juga mereka bisa melakukan pertemuan antara ketua dan anggota Minsk Group untuk briefing pada proses yang akan dijalankan.

c. Durasi

Minsk Group ini dianggap sukses dan selesai dari misinya jika tujuan dari dibentuknya grup ini terpenuhi dengan baik. Tidak ada waktu yang jelas kapan grup ini mempunyai deadline kerja atau kapan grup ini harus melakukan pergantian masa kepengurusan, akan tetapi grup ini akan selesai ketika misi selesai.

d. Komposisi

Minsk Group ini diketuai oleh tiga perwakilan negara besar yaitu: Perancis, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat. Sementara anggota tetap dari grup

ini adalah: Belarus, Germany, Italy, Sweden, Finland, Turkey, Armenia dan Azerbaijan⁴².

Dari sini secara gamblang kita tahu bersama bahwa AS mempunyai alasan atau media untuk melakukan intervensi terhadap konflik Nagorno Karabakh dalam kapasitasnya sebagai fasilitator perdamaian di daerah konflik Nagorno Karabakh. Tidak adanya batas waktu kepengurusan dalam tubuh Minsk Group menjadikan AS dapat melakukan intervensi sepanjang kepentingannya di daerah ini masih tersedia. Sementara itu, daerah ini akan tetap menjadi konflik guna mempertahankan status kepengurusan Minsk Group sebagai tim khusus konflik Nagorno Karabakh yang akan selesai masa jabatannya seketika konflik di Nagorno Karabakh itu berakhir.

⁴² *Ibid*